

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja. PKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dalam situasi kerja yang sebenarnya. Melalui program PKL ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga dalam dunia kerja profesional, meningkatkan soft skill dan hard skill, serta membangun networking yang dapat bermanfaat untuk karir di masa depan.

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia kerja sebagai wujud dari Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, PKL yang bernilai 2 SKS ini diimplementasikan sebagai mata kuliah wajib yang mengacu pada Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur tentang Pedoman Akademik. Sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan PKL UPN "Veteran" Jawa Timur, program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui pembelajaran langsung di dunia kerja yang dapat mengembangkan hard skills dan soft skills mahasiswa. Kegiatan PKL dilaksanakan selama minimal 1-2 bulan dengan bobot 2 SKS yang setara dengan 170 menit x 16 pertemuan aktivitas pembelajaran, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Program ini memiliki sistem evaluasi yang komprehensif meliputi penilaian dari pembimbing lapangan, dosen pembimbing, dan sidang laporan akhir yang mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan dalam Panduan PKL universitas.

Kerjasama antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) terjalin melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Proses ini dimulai dengan penerbitan surat pengantar PKL yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jawa Timur dan ditandatangani oleh Dekan Fasilkom sebagai bentuk rekomendasi resmi dari pihak universitas. Surat pengantar ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kanwil Kemenkumham Jatim dengan menerbitkan surat penerimaan magang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Kerjasama ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh

pengalaman praktis dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam sistem administrasi dan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM. Mahasiswa yang melaksanakan PKL di Kanwil Kemenkumham Jatim berkesempatan untuk terlibat dalam berbagai proyek pengembangan sistem informasi, dan optimalisasi layanan digital yang mendukung kinerja instansi pemerintah tersebut.

Seiring dengan kebutuhan akan efisiensi dalam pengelolaan data dan penyebaran informasi yang luas, diperlukan pengembangan sistem berbasis web. Sistem berbasis web sangat relevan bagi organisasi yang membutuhkan keterbukaan dan efektivitas dalam berbagi data karena memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, fleksibel, dan terpusat. Karena sistem berbasis web memungkinkan data diakses dari berbagai tempat tanpa terbatas pada perangkat atau jaringan internal, ini meningkatkan kerja tim. Langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur adalah pengembangan sistem berbasis web yang menggunakan sistem pengelolaan konten (CMS).

Pengelolaan informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur saat ini menggunakan Content Management System (CMS) Joomla sebagai platform utama. Pemilihan Joomla sebagai sistem manajemen konten menunjukkan bahwa instansi telah mengadopsi pendekatan berbasis web dalam pengelolaan informasinya. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan, terutama dalam proses adaptasi dan pembelajaran sistem karena perbedaan platform yang umum digunakan di lingkungan akademik, seperti WordPress.

Content Management System (CMS) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dalam proses berbagi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. CMS adalah sistem yang dirancang untuk mengelola konten sehingga pemberian informasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan efektif. Dengan implementasi CMS, instansi dapat mengoptimalkan dokumentasi dan penyebaran informasi.

Sebagai mahasiswa PKL di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, kami mendapatkan kesempatan berharga untuk berkontribusi dalam optimalisasi website [jatim.kemenkum.go.id](http://jatim.kemenkum.go.id) serta pengembangan layanan berbasis web di lingkungan instansi. Dalam peran ini, kami terlibat dalam berbagai tugas, seperti meningkatkan performa dan fungsionalitas website agar lebih optimal, memastikan aksesibilitas dan kemudahan navigasi bagi pengguna, serta berkontribusi dalam pengembangan fitur layanan digital yang mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Melalui pengalaman ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan kualitas sistem informasi yang digunakan serta mendukung modernisasi layanan berbasis web di Kanwil Kemenkum Jawa Timur.

Dalam laporan ini, akan dibahas berbagai tugas dan aspek penting yang telah dijalankan selama masa PKL di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Laporan ini akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam optimalisasi website [jatim.kemenkum.go.id](http://jatim.kemenkum.go.id), tantangan yang dihadapi, manfaat yang diperoleh, serta kontribusi dalam pengembangan layanan berbasis web di lingkungan instansi. Selain itu, laporan ini juga akan membahas peran penulis dalam mendukung peningkatan performa website, integrasi layanan digital, serta upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan navigasi bagi pengguna guna mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan di Kanwil Kemenkum Jawa Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Content Management System (CMS) di Kanwil Kemenkum Jawa Timur dapat meningkatkan pengelolaan informasi hukum?
2. Bagaimana peran program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam mendukung pengembangan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan**

Tujuan dari pelaksanaan PKL di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur antara lain:

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Mempelajari Content Management System (CMS) di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur
2. Menerapkan CMS untuk meningkatkan pengelolaan informasi seputar Kementerian Hukum.
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis, baik dalam hard skill maupun soft skill, secara langsung di dunia pemerintahan.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Berkontribusi dalam pengembangan website Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai platform akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
2. Mampu mengimplementasikan Content Management System (CMS) guna menciptakan pusat informasi untuk Kanwil Kemenkum Jawa Timur, sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efisien.

## **1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

### **1.4.1. Manfaat bagi UPN “Veteran” Jawa Timur**

1. Sarana pengenalan UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya Program Studi Sains Data kepada perusahaan atau instansi.
2. UPN “Veteran” Jawa Timur dapat membangun dan memperkuat hubungan dengan mitra.
3. Mendapatkan masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan penerapan di dunia kerja.

### **1.4.2. Manfaat bagi Perusahaan Mitra**

1. Mitra PKL mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa.
2. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang disediakan di UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya pada Program Studi Sains Data.
3. Sarana untuk memberikan penilaian kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan.
4. Sebagai jembatan antara perusahaan atau instansi dan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk menjadi kerja sama yang lebih lanjut, baik dalam hal akademik maupun organisasi.

### **1.4.3. Manfaat bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara profesional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
2. Mahasiswa dapat memperluas wawasan dan membangun relasi profesional yang luas.
3. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang pola pikir strategi alur pemecahan masalah yang terjadi dalam kegiatan PKL.
4. Mahasiswa memiliki kemampuan memecahkan solusi dari masalah yang terjadi dalam kegiatan PKL.
5. Mahasiswa memiliki keterampilan *softskill* dan *hardskill* yang lebih baik dari sebelumnya.